

# Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi)

Dania Meida Rosyidah

Universitas Nusa Putra: [rania.meida@nusaputra.ac.id](mailto:rania.meida@nusaputra.ac.id)

---

## ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara parsial dan secara simultan penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi. Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen. Sedangkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang pengelolaan aset daerah yang bekerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 pegawai di bidang akuntansi dan pelaporan dan bidang pengelolaan aset daerah. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.20.00*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 43,0% dan 29,0%. Sedangkan secara simultan besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 72,0%.

**Kata Kunci:** Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## ABSTRACT

---

*This study aims to determine how much influence the partial and simultaneous application of accounting standards of governance and human resource competencies on the quality of local government financial statements to the Department of Revenue, Finance and Asset Management Regional Government of Sukabumi. Factors tested in this study is the application of accounting standards of governance and human resource competencies as an independent variable. While the quality of the financial reports of local governments as the dependent variable. The method used in this research is explanatory. The population in this study were all employees of accounting and reporting and asset management area that works at the Department of Revenue, Finance and Asset Management Regional Government of Sukabumi. Sampling technique used in this research is purposive sampling, the number of samples in this study were 34 employees in the field of accounting and reporting and asset management area. While the methods of analysis used in this research is multiple linear regression analysis at a significance level of 5%. Programs used in analyzing the data using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.20.00. The results showed that partially much influence the application of accounting standards of governance and human resource competencies in contributing influence on the quality of local government financial statements amounted to 43.0% and 29.0%. While simultaneously the influence application of accounting standards of governance and human resource competencies in contributing influence on the quality of local government financial statements amounted to 72.0%.*

**Keywords:** Implementation of Government Accounting Standards, Competency of Human Resources and Quality of Government Financial Statement.

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah membuat sebuah sistem, yaitu sistem otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi tersebut merupakan sistem yang mengatur pemerintahan, dimana pemerintah daerah wajib melaporkan setiap aktivitas yang terjadi pada pemerintah pusat. Dengan sistem desentralisasi tersebut, setiap pemerintah daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengurus pengelolaan keuangan daerahnya sendiri dan kemudian membuat laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Pusat atas kegiatan yang sudah dilakukan. (Siahaan, 2013).

Laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan laporan keuangan yang berkualitas. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia. (Nugraheni, 2008).

Menurut Prasetya (2005), Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja manajemen suatu pemerintahan kepada publik dan dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). (Devi, 2012).

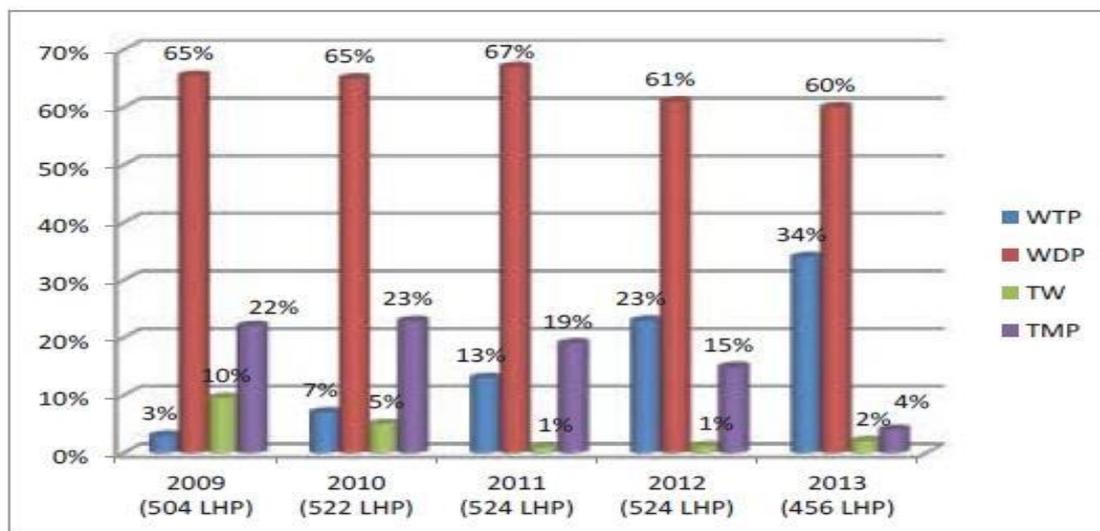
Fenomena yang berkaitan dengan kualitas Laporan Keuangan digambarkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan**

Pemerintah	Provinsi					Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total
2009	1	24	3	5	33	7	240	37	95	379	7	66	8	11	92
	3%	73%	9%	15%	100%	2%	63%	10%	25%	100%	7%	72%	9%	12%	100%
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11	93
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%	100%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7	92
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%	100%
2012	17	11	0	5	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7	90
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%	100%
2013	15	12	0	2	29	102	214	9	14	339	36	50	0	2	88
	52%	41%	0%	7%	100%	30%	63%	3%	4%	100%	41%	57%	0%	2%	100%

sumber: www.bpk.go.id

**Grafik 1.1**  
**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013**



sumber: www.bpk.go.id

Berdasarkan tabel dan grafik di atas digambarkan bahwa perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan peningkatan kompetensi yang tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2009 BPK memberikan opini WTP hanya kepada 15 entitas, tahun 2010 sebanyak 34 entitas, dan tahun 2011 sebanyak 67 entitas. Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diikuti penurunan proporsi opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kompetensi dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar dan berkualitas. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik.

Atas 9 LKPD yang memperoleh opini TW, dan 18 LKPD yang memperoleh opini TMP, pada umumnya laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP, di antaranya: akun aset tetap, kas, belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. (Rahayu, 2014).

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi empat karakteristik. Dimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu adalah laporan yang telah memenuhi karakteristik yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. (Nurillah, 2014).

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompoten. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan bermanfaat dalam hal pengambilan keputusan. (Wati, 2014).

Menurut Hervesi (2005) dalam Indriasari (2008), Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*Skill*), pengetahuan (*Knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melakukan suatu pekerjaan.

Hutapea dan Thoha (2008) juga mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu: Pengetahuan (*knowledge*), Keterampilan (*skill*), dan Sikap (*attitude*). Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan. (Mardiasmo, 2002).

Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam

memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Latar belakang pendidikan sebagai bagian dari kapasitas SDM merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Di Indonesia, kesiapan SDM pemerintah menuju tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan masih menjadi dilema. Negara kita masih kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara khususnya yang berlatar belakang ilmu akuntansi (Fontanella, 2010).

Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan standar akuntansi pemerintah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai di pemerintahan memahami standar akuntansi pemerintahan tersebut. Wati, 2014).

Berkaitan dengan belum berkualitaskannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz (2014), menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit BPK, banyak pemerintah daerah yang belum menyajikan laporan keuangan secara wajar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai bahwa kualitas penyusunan laporan keuangan di daerah rata-rata masih rendah yang terlihat dari masih sedikitnya daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang hanya 30 persen dari total 524 pemda. Pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporannya. Penilaian itu didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ia juga mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh kurangnya penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

### B. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Suhaenah (2001) dalam Hadiputro (2015) Kompetensi Sumber Daya Manusia yaitu kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Maksud di sini adalah kecakapan, keterampilan, dan kebiasaan yang diperlukan seseorang dalam kehidupannya baik sebagai pribadi ataupun karyawan (termasuk di dalamnya pimpinan).

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Winidyaningrum (2010), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat

dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

### C. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna, oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008). Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.”

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dapat dipahami.

### D. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka konseptual ini terdiri dari standar (teknik dan prinsip) praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya, dan standar itu adalah standar akuntansi. Standar akuntansi mencakup peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi. Menurut (Harahap, 2007) menyatakan bahwa:

“Dalam standar akuntansi dijelaskan tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan modal, serta transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan”.

Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sehingga demikian hubungan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki hubungan berdasarkan teori diatas. Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengantar, menyatakan bahwa:

“Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Seluruh instansi pemerintah daerah dapat mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

#### **E. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Azhar, 2007). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas (Guy et al, 2002). Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), di samping pengembangan kapasitas organisasi (Insani, 2010). Apabila dalam kaitan dengan penyusunan laporan keuangan, maka sumber daya manusia yang berkompeten dapat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Amran (2009) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Dengan adanya sumber daya yang berkompeten tentu akan mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

#### **F. Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki hubungan berdasarkan teori diatas. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain penerapan standar akuntansi pemerintahan, untuk memenuhi kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas maka harus didukung pula dengan kompetensi sumber daya manusia

yang dimiliki. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Yoana Rahayu Pratiwi, dkk (2015) meneliti Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitiannya menyatakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Hilda Berliana Nagari (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan untuk variabel independen dalam penelitian ini yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan kompetensi sumber daya manusia. Subjek dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi dan yang menjadi populasi sasaran/unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang Akuntansi dan Pelaporan dan bidang Pengelolaan Aset Daerah yang bekerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi. Teknik sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang Akuntansi dan Pelaporan dan bidang Pengelolaan Aset Daerah yang bekerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Sukabumi. Jumlah responden seluruhnya adalah 34 orang, dengan asumsi bahwa seluruh responden tersebut dapat memahami dan menjawab pertanyaan yang telah disediakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatori dengan melakukan survei. Adapun teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan penelitian lapangan melalui kuesioner dan penelitian kepustakaan.

Metode analisis data dimulai dengan uji validitas dengan menggunakan rumus koefisien korelasi *Product Moments Pearson* dan uji reliabilitas dengan menggunakan *Teknik Cronbach's Alpha*, lalu dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolonieritas, dan dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis regresi berganda, korelasi berganda dan koefisien determinasi. Pada pengujian hipotesis diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik T. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Sebelum data hasil penelitian di analisis lebih lanjut, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan berupa butir item pernyataan yang diajukan kepada responden dapat mengukur secara cermat dan tepat apa yang ingin diukur pada penelitian ini.

**Hasil Pengujian Validitas**

Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor jawaban responden dari setiap pertanyaan. Nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel, apabila r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pertanyaan kuesioner dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Validitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,702	0,287	Valid
P2	0,757	0,287	Valid
P3	0,740	0,287	Valid
P4	0,822	0,287	Valid
P5	0,782	0,287	Valid
P6	0,921	0,287	Valid
P7	0,744	0,287	Valid
P8	0,745	0,287	Valid
P9	0,734	0,287	Valid
P10	0,874	0,287	Valid
P11	0,862	0,287	Valid
P12	0,799	0,287	Valid
P13	0,791	0,287	Valid
P14	0,857	0,287	Valid
P15	0,832	0,287	Valid
P16	0,701	0,287	Valid
P17	0,767	0,287	Valid
P18	0,806	0,287	Valid
P19	0,836	0,287	Valid
P20	0,842	0,287	Valid
P21	0,782	0,287	Valid
P22	0,851	0,287	Valid
P23	0,851	0,287	Valid
P24	0,722	0,287	Valid
P25	0,734	0,287	Valid
P26	0,815	0,287	Valid
P27	0,828	0,287	Valid
P28	0,765	0,287	Valid
P29	0,674	0,287	Valid
P30	0,734	0,287	Valid

P31	0,849	0,287	Valid
P32	0,811	0,287	Valid
P33	0,815	0,287	Valid
P34	0,882	0,287	Valid

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut memenuhi kriteria validitas yaitu nilai r hitung > nilai r tabel. Sedangkan untuk hasil pengujian atas variabel kompetensi sumber daya manusia sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,612	0,287	Valid
P2	0,815	0,287	Valid
P3	0,654	0,287	Valid
P4	0,739	0,287	Valid
P5	0,672	0,287	Valid
P6	0,677	0,287	Valid
P7	0,612	0,287	Valid
P8	0,562	0,287	Valid
P9	0,636	0,287	Valid
P10	0,780	0,287	Valid

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia tersebut memenuhi kriteria validitas yaitu nilai r hitung > nilai r tabel. Sedangkan untuk hasil pengujian atas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,802	0,287	Valid
P2	0,839	0,287	Valid
P3	0,834	0,287	Valid
P4	0,667	0,287	Valid
P5	0,816	0,287	Valid
P6	0,754	0,287	Valid
P7	0,727	0,287	Valid
P8	0,704	0,287	Valid
P9	0,854	0,287	Valid
P10	0,777	0,287	Valid

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan uji validitas terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut memenuhi kriteria validitas yaitu nilai r hitung > nilai r tabel.

**Hasil Pengujian Reliabilitas**

Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan suatu variable dan disusun dalam satu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Reliabilitas Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,981	,984	34

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari tabel di atas nilai reliabilitas variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,984 nilai ini memiliki tingkat keandalan yang sangat tinggi karena r berada >0,90 sehingga variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sudah memenuhi kriteria reliabel. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas variabel kompetensi sumber daya manusia sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Reliabilitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,906	,911	10

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari tabel di atas nilai reliabilitas variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,911 nilai ini memiliki tingkat keandalan sangat tinggi karena r berada >0,90 sehingga variabel kompetensi sumber daya manusia sudah memenuhi kriteria reliabel. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,938	,947	10

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari tabel di atas nilai reliabilitas variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,947 nilai ini memiliki tingkat keandalan sangat tinggi karena r berada >0,90 sehingga variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria reliabel.

**Analisis Koefisien Korelasi Pearson**

Analisis ini mengukur kuat lemahnya hubungan dan arahnya variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat). Kedua variabel tersebut diukur dalam skala interval.

**Tabel 4.7**  
**Analisis Koefisien Korelasi *Pearson***

Correlations				
		Standar Akuntansi Pemerintahan	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Standar Akuntansi Pemerintahan	Pearson Correlation	1	,750	,811
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	34	34	34
Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pearson Correlation	,750	1	,773
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	34	34	34
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pearson Correlation	,811	,773	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	34	34	34

Sumber: Hasil Output SPSS

Dari tabel 4.7 di atas diketahui nilai koefisien korelasi *pearson* untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,811 nilai koefisien ini berada di antara  $0,80 < 0,811 < 1,000$ , artinya variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien korelasi *pearson* untuk variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,773 nilai koefisien ini berada di antara  $0,60 < 0,773 < 0,799$ , artinya variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan hubungan yang kuat dan positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**B. Uji Asumsi Klasik**  
**Uji Normalitas**

Pengujian normalitas menggunakan *kolmogrov smirnov*. Dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu:

- a. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal atau  $H_0$  ditolak
- b. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka distribusi data normal atau  $H_0$  diterima

$H_0$ : data residual berdistribusi normal

$H_a$ : data residual tidak berdistribusi normal

Hasil pengujian normalitas menggunakan *kolmogrov smirnov* dapat dilihat pada berikut ini:

**Tabel 4.8**  
**Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov**

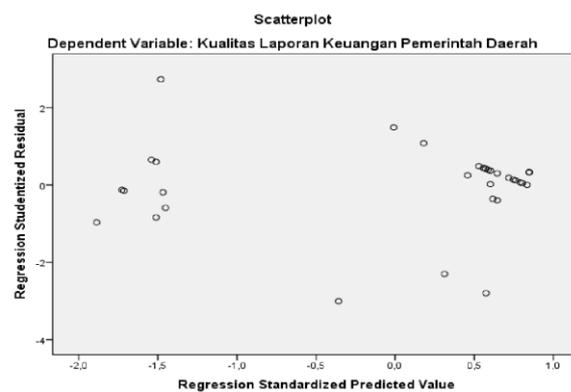
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2,83710071
Most Extreme Differences	Absolute	,190
	Positive	,175
	Negative	-,190
Kolmogorov-Smirnov Z		1,109
Asymp. Sig. (2-tailed)		,171

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa besarnya nilai *kolmogorov smirnov* adalah 1,109 dengan nilai signifikansi 0,171. Oleh karena nilai signifikansi yang dihasilkan oleh *kolmogorov smirnov* lebih dari atau 5% (taraf nyata signifikansi penelitian) yaitu (0,171 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima atau data residual berdistribusi normal, dengan kata lain model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas atas data berdistribusi normal.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data, uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut:



Sumber: Hasil Output SPSS

**Gambar 4.1**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Dari hasil pengujian *scatter plot* pada Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar antara di bawah 0 sampai di atas 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

**Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi yang sempurna antara satu variabel bebas lain. Uji ini dilakukan dengan menggunakan VIF dengan kriteria, jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF suatu variabel bebas > 10, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, ternyata diperoleh nilai VIF masing-masing variabel bebas sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Standar Akuntansi Pemerintahan	,437	2,287
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,437	2,287

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji multikolinearitas di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari variabel independen menunjukkan nilai lebih dari 0,1 dan nilai VIF menunjukkan nilai tidak lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada antara variabel-variabel sehingga dari hubungan yang diperoleh dapat ditaksir variabel yang satu, apabila harga variabel lainnya diketahui. Persamaan model regresi yang digunakan penulis adalah persamaan model regresi berganda (*multiple regression analysis*). Berikut ini disajikan tabel model regresi yang terbentuk sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10,307	6,355		-1,622	,115
	Standar Akuntansi Pemerintahan	,197	,053	,530	3,683	,001
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,528	,202	,375	2,610	,014

Sumber: Hasil Output SPSS

Model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil penelitian adalah:

$$Y = -10,307 + 0,197 X_1 + 0,528 X_2 + e$$

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan:

1. Jika  $\alpha$  = konstanta sebesar -10,307 artinya apabila variabel independen yaitu variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan bernilai sebesar -10,307.
2. Jika nilai koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan menunjukkan sebesar 0,197, artinya apabila variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan mengalami kenaikan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,197.
3. Jika nilai koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan sebesar 0,528, artinya apabila variabel kompetensi sumber daya manusia mengalami kenaikan sebesar (satu) satuan, sedangkan variabel independen lainnya yaitu variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,528.

**Analisis Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai  $R^2$  dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya.

**Tabel 4.11**  
**Koefisien Determinasi Simultan**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,848 <sup>a</sup>	,720	,702	2,927190

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 4.11 di atas, menunjukkan bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,720 yang berarti bahwa variabilitas variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah sebesar 72,0%, sedangkan sisanya sebesar 28,0% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

**Tabel 4.12**  
**Koefisien Determinasi Parsial**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Standardized Coefficients	Correlations
1 (Constant)		
Standar Akuntansi Pemerintahan	,530	,811
Kompetensi Sumber Daya Manusia	,375	,773

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi secara parsial pada tabel di atas, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Pengaruh  $X_1$  terhadap  $Y = 0,530 \times 0,811 = 0,430$  atau 43,0%

Pengaruh  $X_2$  terhadap  $Y = 0,375 \times 0,773 = 0,290$  atau 29,0%

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa dari kedua variabel bebas yang dianalisis, terlihat bahwa besarnya variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 43,0%. Sedangkan untuk besarnya variabel kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 29,0%.

**C. Pengujian Hipotesis**

**Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.13**  
**Pengujian Hipotesis Secara Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	681,937	2	340,969	39,794	,000 <sup>b</sup>
	Residual	265,622	31	8,568		
	Total	947,559	33			

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji F) pada tabel 4.13 di atas, didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05 (5%), yaitu  $0,000 < 0,05$ . Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 39,794 sedangkan  $F_{tabel}$  sebesar 3,30. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $39,794 > 3,30$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan  $H_3$  diterima, artinya secara bersama-sama atau secara simultan variabel independen yaitu variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Pengujian ini pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan t dari hasil perhitungan. Apabila nilai sig. t < tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai sig. t > tingkat signifikan (0,05), maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Pengujian Hipotesis Secara Parsial**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10,307	6,355		-1,622	,115
	Standar Akuntansi Pemerintahan	,197	,053	,530	3,683	,001
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	,528	,202	,375	2,610	,014

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.14, hasil pengujian secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar  $0,001 < 0,05$  (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,683, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,696. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,683 > 1,696$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima, artinya secara parsial variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai signifikansi variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar  $0,014 < 0,05$  (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,610, sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,696. Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,610 > 1,696$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima artinya secara parsial variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis linear berganda dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besarnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 43,0%.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besarnya Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 29,0%.
3. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa besarnya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 72,0%.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terlepas dari hasil tersebut, masih terdapat beberapa hal yang masih harus dibenahi oleh Pemerintah Kota Sukabumi guna meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Pemerintah Kota Sukabumi disarankan agar dapat meningkatkan pemahaman setiap pegawai instansi pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) khususnya untuk pemahaman yang kurang mengenai PSAP No.01, PSAP No. 02, PSAP No. 03, PSAP No. 06, PSAP No. 07, PSAP No. 10, dan PSAP No. 12. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu dengan mengadakan pelatihan kepada pegawai di instansi pemerintahan secara berkala tentang pemahaman konsep dasar dan implementasi penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), mewajibkan pendidikan berkelanjutan untuk setiap pegawai di instansi pemerintah, dan menindak tegas bagi setiap pegawai di instansi pemerintah yang melanggar peraturan atau undang-undang yang berlaku. Hal-hal tersebut dimaksudkan agar dapat meningkatkan pemahaman mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia pegawai di instansi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan tidak terpaku hanya menggunakan dua faktor saja yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia seperti dalam penelitian ini, namun dapat menambah faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti halnya faktor sistem pengendalian internal, sistem informasi dan komunikasi, dan faktor lainnya. Selain itu, agar hasil penelitian ini dapat digunakan secara luas, subjek penelitian tidak hanya terpaku pada satu subjek Dinas saja, namun dapat menggunakan seluruh Dinas di Pemerintahan Kota Sukabumi atau dapat menggunakan subjek penelitian lainnya baik di Kota/Kabupaten atau Provinsi yang mencakup secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azhar. 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri No. 13 pada Pemerintah Kota Banda Aceh*. Medan: Tesis Sekolah Pascasarjana USU.
- Azhari, Azril. 2000. *Tinjauan tentang Kualitas Manusia Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 021 Tahun ke 5 Januari.
- Bastian, Indra. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Bowo. 2009. *Hasil Audit BPK*. Melalui <http://www.ahmadheryawan.com/>
- Fontanella. Amy. 2010. *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Padang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program BM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guy, Dan M. et al. 2002. *Auditing Jilid I*. Penerjemah: Sugiyarto. Edisi 5. Jakarta: Erlangga.
- Hadiputro, Eliza Kusumawardani. (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Instansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Skripsi Fakultas Universitas Widyatama Bandung. (Tidak Dipublikasikan)
- Halim, Abdul. 2001. *Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (Sebuah studi kasus pada anggaran daerah provinsi di Indonesia)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (4).

- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah: sebuah peluang peneliti anggaran dan akuntansi.
- Hapsari, Andhisa Setya. 2008. *Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Auditan BPK*. Melalui <http://assassinisborn.multiply.com/journal/item>.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. Sofyan Syafri. 2011 *Teori Akuntansi* (Edisi Revisi 2011). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartina, Silka. 2009. *Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Langkat*. Skripsi Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Pontianak.
- Insani, Istyadi. 2010. *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kartikawangi, Dorien. 2002. *Karakteristik Sumber Daya Manusia yang Dibutuhkan Dunia Industri/Organisasi dalam Menghadapi Globalisasi*. Majalah Ilmiah Universitas Katolik Parahyangan. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Matindas, Rudolf Wennemar. 2002. *Managemen Sumber Daya Manusia Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan, dan Usaha*, Edisi II. Jakarta: Grafiti.
- Nagari, Hilda Berliana. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Skripsi Fakultas Universitas Widyatama Bandung. (Tidak Dipublikasikan)
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional*. Pascasarjana Universitas Gunadarma.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permadi, Angga Dwi. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Universitas Widyatama Bandung. (Tidak Dipublikasikan)
- Permendagri No. 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Prasetya, Gede Edy. 2005. *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Andi.

- Rahayu, Liza dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Riau.
- Roviyantie, Devi. 2012. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Universitas Siliwangi.
- Rudana, Nyoman. 2005. *Makalah Pengaruh Kompetensi Aparat Pemerintah Daerah dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik*. Jakarta: STIA LAN.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* Buku 1 Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-16. Bandung: CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Siahaan, Moh Gusfin dan Fachruzamman. 2013. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang*. Binus University.
- Sukmadinata. Nana Saodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Warisno. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi*. Medan: Sekolah Pascasarjana USU.
- Wati, Kadek Desiana dkk. 2014. *Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Winidyaningrum, Celviana Rahmawati. (2010). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Zulganef. 2008. *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- [www.skalanews.com](http://www.skalanews.com)